

TESIS

**PENGARUH KAPASITAS ORGANISASI, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP IMPLEMENTASI
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS
AKRUAL YANG DIMODERASI OLEH KOMITMEN
ORGANISASI DI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJENE**

***THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CAPACITY, UTILIZATION
OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE IMPLEMENTATION
OF GOVERNMENT-BASED ACCOUNTING STANDARDS
ACCRUALS MODERATED BY COMMITMENTS ORGANIZATION
IN THE GOVERNMENT MAJENE DISTRICT***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

RAHMAT HIDAYAT

A062202015



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH KAPASITAS ORGANISASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL YANG DIMODERASI
OLEH KOMITMEN ORGANISASI DI PEMERINTAH
KABUPATEN MAJENE**

Disusun dan diajukan oleh

**RAHMAT HIDAYAT
A062202015**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 27 Januari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

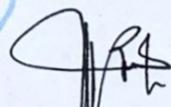
Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. R. A. Damayanti, SE., Ak., M.Soc. Sc., CA.
NIP 196703191992032003



Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si.
NIP 196705181998022001

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi



Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA.
NIP 196811251994122002



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 19640205 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rahmat Hidayat
NIM : A062202015
Jurusan / Program Studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PENGARUH KAPASITAS ORGANISASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL YANG DIMODERASI OLEH KOMITMEN ORGANISASI DI PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 8 Februari 2023
Yang membuat pernyataan



Rahmat Hidayat

PRAKATA

Bismilaahirrahmanirrahiim,

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister pada Program Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Semata mata hanya karena karunia Nya dalam bentuk kesehatan, ketenangan pikiran, kesempatan, kegigihan serta orang-orang baik di sekitar penulis sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis memberikan apresiasi yang setinggi tingginya serta rasa terima kasih yang setulus tulusnya kepada :

Dr. Ratna Ayu Damayanti, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA selaku pembimbing I yang selalu memberikan motivasi serta sumbangan pemikiran yang kritis, dan bijaksana dalam membimbing penulis untuk memberikan pemahaman atas estetika penulisan yang baik.

Dr. Darmawati, SE., Ak., M.Si., CA, selaku pembimbing II, yang selalu bersemangat dan dengan rinci memberikan masukan, tanggapan mengenai riset serta motivasi dan pengarahan kepada penulis dalam penyempurnaan tesis ini.

Bapak Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA, dan Prof. Dr. Syarifuddin, SE., Ak., M.Soc., Sc., CA, dan Dr. Asri Usman, SE., Ak., M.Si., CA., selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan tesis ini.

Pimpinan Universitas Hasanuddin dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yaitu Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM dan Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin, Dr. Aini Indrijawati SE., Ak., MSi., CA yang telah memberikan bantuan dan fasilitas kepada penulis selama belajar di Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Bapak dan ibu dosen pada Program Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar yang dengan ikhlas mentransfer ilmu dan kepakaran serta wawasan, mendorong, memotivasi dan membimbing dalam meletakkan dasar-dasar teoritis kepada penulis. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Majene beserta jajarannya para pimpinan OPD

Kabupaten Majene yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian di wilayah pemerintahan beliau.

Teristimewa kepada ayahanda H. Ruslan Abd Halim, S.sos dan ibunda Ir.Hj. Sasmah Muhammad yang telah mendidik, memberikan kasih sayang dan memotivasi penulis untuk terus belajar, meraih pendidikan tertinggi serta terus mendoakan penulis agar tabah dan konsisten dalam menyusun tesis ini. Istri tercinta, Andi Rahmaniar idris, S.E dan anak tercinta Muhammad Raffasyah Rahmat, atas pengertiannya, kesetiaannya dengan terus mendampingi serta mendambakan kelulusan penulis selaku ayah dan suami dalam menempuh jenjang pendidikan magister. (Almarhum) Kakak pertama, Farid Wajdi, SE.,Ak.,M.Ak.,CA.,CPA, sosok kakak yang penulis idolakan dan salah satu motivasi penulis untuk tetap melanjutkan mimpi beliau yaitu melanjutkan Pendidikan ke jenjang tertinggi terima kasih atas motivasinya, kakak kedua, Hj. Astuti Ruslan, SP. dan kakak ketiga Kurniati Ruslan, S.Pd.,M.Pd. yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Seluruh staf akademik Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran administrasi kepada penulis dari awal hingga akhir. Terima kasih atas bantuannya yang tulus selama ini. Serta kepada seluruh pihak yang penulis belum sebutkan satu per satu dalam tesis ini. Kiranya bantuan yang tulus dari bapak/ibu dan saudara-saudari mendapat balasan berlipat ganda dari Allah Yang Maha Kuasa. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Meski penulis tetap menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis nantikan demi kesempurnaan tesis ini.

Makassar,31 Desember 2022

Penulis

Rahmat Hidayat

ABSTRAK

RAHMAT HIDAYAT. Pengaruh Kapasitas Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Yang Dimoderasi Oleh Komitmen Organisasi di Pemerintah Kabupaten Majene (dibimbing oleh **R.A. Damayanti dan Darmawati**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual yang dimoderasi oleh komitmen organisasi di Pemkab Majene.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Kabupaten Majene sebanyak 93 pegawai yang berdinasi di 31 Organisasi Pemerintah Daerah tersebut. Pengambilan sampel menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan *Structural Equation Modelling-Partial Least Squares*. SEM dipilih karena lebih akurat dalam mengolah data tidak hanya diperoleh hubungan kausalitas antar variabel dan konstruk namun untuk mengetahui besaran dari hubungan antar variabel dan konstruk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Majene. Komitmen organisasi sebagai variabel moderasi mampu memoderasi hubungan antara kapasitas organisasi, pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual, Namun memperlemah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Majene.

Kata kunci: Kapasitas organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan implementasi SAP berbasis akrual.



ABSTRAK

RAHMAT HIDAYAT. The Influence of Organizational Capacity, Utilization of Information Technology on the Implementation of Accrual-Based Government Accounting Standards Moderated by Organizational Commitment in Majene Regency (supervised by **R.A. Damayanti and Darmawati**).

This study aims to determine the effect of organizational capacity and utilization of information technology on the implementation of accrual-based SAP moderated by organizational commitment in the Majene Regency Government.

The population used in this study were Majene Regency Government employees, totaling 93 people who served in 31 Regional Apparatus Organizations. Sampling uses primary data collected through a questionnaire. The data were then analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares. SEM was chosen because it is more accurate in processing data to obtain causal relationships between variables and constructs and to determine the magnitude of the relationship between variables and constructs.

The results showed that organizational capacity and utilization of information technology had a positive and significant effect on the application of accrual-based Government Accounting Standards in the Majene Regency Government. Organizational commitment as a moderating variable can moderate the relationship between organizational capacity, and the use of information technology on the implementation of accrual-based SAP, but weakens the influence of the use of information technology on the implementation of accrual-based SAP at Majene Regency Government.

Keywords: Organizational capacity, utilization of information technology, organizational commitment, and accrual-based SAP implementation.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Sistematika penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	14
2.1.1 <i>Theory of Planned Behavior</i>	14
2.1.2 <i>Theory Technology Acceptance Model</i>	17
2.1.3 Kapasitas Organisasi.....	21
2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	24
2.1.5 Komitmen Organisasi.....	26
2.1.6 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.....	28
2.2 Tinjauan Empiris.....	31
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS.....	34
3.1 Kerangka Pemikiran.....	34
3.2 Hipotesis.....	35
3.2.1 Hubungan Kapasitas organisasi terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua.....	35
3.2.2 Hubungan Pemanfaatan teknologi informasi terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua.....	37
3.2.3 Komitmen organisasi memoderasi pengaruh kapasitas organisasi terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua.....	38
3.2.4 Komitmen organisasi memoderasi pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrua.....	39
BAB IV METODE PENELITIAN.....	42
4.1 Rancangan Penelitian.....	42
4.2 Situs dan Waktu Penelitian.....	42
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	42

4.4 Jenis dan Sumber Data	43
4.5 Metode Pengumpulan Data	43
4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	44
4.6.1 Variabel Penelitian	44
4.6.2 Definisi Operasional	45
4.7 Teknik Analisis Data	46
BAB V HASIL PENELITIAN	51
5.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	51
5.2 Statistik Deskriptif.....	54
5.3 Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)	60
5.4 5.4.1 Uji Validitas	60
5.5 5.4.2 Uji Reliabilitas	63
5.6 Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner Model).....	64
5.5.1 Uji R ² (R Square)	64
5.5.2 Uji Multikolinearitas	65
5.5.3 Perkiraan Koefisien Analisis Jalur	65
5.7 Pengujian Hipotesis	66
BAB VI PEMBAHASAN	69
6.1 Kapasitas Organisasi Berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berdasarkan akrua di Pemkab Majene	69
6.2 Kualitas Informasi Berpengaruh positif terhadap Implementasi SAP Berdasarkan akrua di Pemkab Majene	71
6.3 Komitmen Organisasi Memperkuat Pengaruh Kapasitas Organisasi Terhadap Implementasi SAP Berdasarkan Akrua	73
6.4 Komitmen Organisasi Memperkuat Pengaruh Kualitas Informasi Terhadap Implementasi SAP Berdasarkan Akrua	74
BAB VII PENUTUP	77
7.1 Kesimpulan.....	77
7.2 Implikasi	78
7.3 Keterbatasan Penelitian	79
7.4 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Definisi Operasional.....	45
5.1 Gambaran umum responden.....	51
5.2 Gambaran umum responden berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah.....	53
5.3 Statistik Deskriptif Variabel.....	54
5.4 Statistik Deskriptif Variabel Kapasitas Organisasi.....	55
5.5 Statistik Deskriptif Variabel Kualitas Informasi.....	56
5.6 Statistik Deskriptif Variabel Implementasi SAP.....	58
5.7 Statistik Deskriptif Variabel Komitmen Organisasi.....	59
5.8 Uji Faktor Loading Validitas Konvergen.....	61
5.9 Deskripsi Faktor Loading.....	62
5.10 Perhitungan AVE.....	63
5.11 Uji Reliabilitas.....	63
5.12 Uji R2.....	64
5.13 Uji Multikolinearitas.....	65
5.14 Koefisien Jalur Bootstrapping.....	66
6.1 Ringkasan Hasil Penelitian.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Diagram Konsep Teori TPB	16
2.2 Diagram Konsep Teori TAM	18
2.3 <i>Factor Analysis of TAM Items</i>	19
3.1 Kerangka Pemikiran.....	34
3.2 Kerangka Konseptual.....	35
3.2 Kerangka Konseptual.....	30
5.1 Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi dalam sistem tata kelola keuangan daerah di Indonesia telah disibukkan oleh penerapan akuntansi berbasis akrual beberapa dekade terakhir. Namun, terdapat perdebatan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual yang telah diteliti secara ekstensif selama beberapa dekade terakhir dan sekarang disebut sebagai “musnahnya risiko ketidaktelitian” dan terus bergerak ke arah perbaikan (Syarifuddin, 2018). Oleh karena itu, isu mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual yang ekstensif dalam kerangka manajemen dan pelaporan keuangan, misalnya di *United Kingdom* (Likierman, 2000), atau yang masih berada pada tahap mengumumkan untuk bergerak ke arah basis akrual, misalnya Hong Kong (Awty, 2002). Sedangkan penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Federal Malaysia telah ditunda dua kali, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum siap untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual (Ismail *et al.*, 2018).

Fenomena perdebatan mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual di beberapa negara terjadi mulai dari saat pengenalan sampai dengan akuntansi berbasis akrual telah berlangsung (Damayanti, 2013:89). Perdebatan ini pun berdampak pada perkembangan akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan di sektor publik selama beberapa dekade terakhir. Perdebatan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam organisasi pemerintah pun telah mendesak penggunaan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan (Agriyanto *et al.*, 2016).

Beberapa Penelitian yang membahas tentang penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah pusat/daerah seperti Primasari *et al.* (2018), Ismail *et al.* (2018), Muda & Afrina (2019), Nakmahachalasint & Narktabtee (2019) Nguyen & Nguyen, (2020), Anto *et al.* (2022). Nakmahachalasint & Narktabtee (2019) berpendapat bahwa Thailand menghadapi beberapa hambatan dalam tahap implementasi awal, seperti kurangnya akuntan publik yang berkualitas, kurangnya pelatihan yang memadai, dan kegagalan untuk memahami kegunaan informasi akuntansi berbasis akrual. Ismail *et al.* (2018) Menunjukkan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Federal Malaysia telah ditunda dua kali. Awalnya pelaksanaannya ditunda dari tahun 2015 ke tahun 2017 dan dilanjutkan ditunda hingga tahun 2018. Penundaan transisi, sampai batas tertentu, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum siap untuk menerapkan akuntansi akrual.

Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu bentuk reformasi pencatatan keuangan pada sektor pemerintahan. Penerapan akuntansi berbasis akrual di lembaga pemerintah diprakarsai oleh pemerintah Selandia Baru dan Australia (Carlin, 2005), tetapi sebagian besar pemerintah di seluruh dunia berada di bawah tekanan untuk melakukan reformasi sistem dan proses manajemen keuangan mereka berdasarkan akuntansi berbasis akrual (Salato *et al.*, 2022). Namun, inisiatif tersebut kemudian diikuti oleh negara maju lainnya, bahkan negara berkembang seperti Indonesia.

Di Indonesia, aturan yang menetapkan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Di sini, pemerintah berkewajiban mengubah arah dari *cash* basis menjadi *full accrual* basis. Implementasi sistem

baru menuntut para pegawai untuk dapat beradaptasi dengan sistem yang ada saat ini (Primasari *et al.*, 2017).

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di pemerintah pusat maupun daerah yang dimulai pada tahun 2015 dengan menggunakan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Aplikasi Lembaga. Penetapan peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrua yang ditandatangani oleh Presiden mewajibkan seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua yang dimulai sejak 1 Januari 2015. Sistem Akuntansi Berbasis Akrua pemerintah adalah pengembangan Sistem Akuntansi Proksi Pengguna Anggaran yang digunakan sebelum tahun 2015 dengan menggunakan laporan keuangan berbasis kas. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) nomor 64 tahun 2013 perihal Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah mulai diterapkan di berbagai Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia sejak tahun 2015 (Henukh *et al.*, 2020).

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua masih dalam pengembangan, sehingga sering kali memerlukan pembaruan untuk memperbaiki fitur aplikasi yang ada. Mengingat perubahan basis akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrua penuh, aparatur manajemen keuangan daerah dituntut untuk mengembangkan pemahaman dalam akuntansi. Untuk mendapatkan aparatur yang kompeten di bidang ini, hal ini tidak terlepas dari latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh aparatur manajemen di bidang keuangan itu sendiri (Muda & Afrina, 2019).

Salah satu Pemerintah Daerah yang menerapkan SAP berbasis akrua adalah Pemerintah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan

Peraturan Bupati Majene Nomor 18 Tahun 2014 tentang sistem dan prosedur akuntansi Pemerintah Kabupaten Majene, pengimplementasian sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam peraturan tersebut maka diwajibkan paling lambat dilaksanakan tahun anggaran 2015. Dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Majene diharapkan memiliki kapasitas organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi yang baik, karena jika tidak, maka tujuan yang ingin dicapai terkait dengan keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual tidak akan tercapai. Dalam menerapkan SAP berbasis akrual ini, Pemkab Majene memberikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (LKPD TA) 2020 kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili oleh Hery Ridwan (BPK RI, 2021). Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Majene berhasil mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut mulai dari tahun 2015 sampai 2021 (BPK RI, 2022).

Berdasarkan catatan atas laporan keuangan BPK RI (2021) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam penerapan SAP yaitu, pertama efektivitas tata laksana dan keorganisasian dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur pemerintah daerah. Kedua, dalam implementasi pengelolaan keuangan, masih banyak Pejabat Penatausahaan Keuangan di tingkat OPD yang belum memahami tugas dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan di OPD. Ketiga, adapun pada ranah pelaporan, masih banyak PPK-OPD yang tidak terlibat secara penuh dalam penyusunan laporan keuangan OPD. Masih banyak PPK-OPD masih bergantung terhadap bendahara maupun operator dalam menyusun laporan keuangan. Keempat, walaupun Pemerintah Kabupaten Majene telah bekerja sama dengan

lembaga pengawas internal pemerintah lainnya dalam mengembangkan sistem informasi yang dapat memudahkan, namun sebagian besar PPK-OPD belum memanfaatkan sistem informasi secara efektif. Pekerjaan teknis tersebut lebih sering dilakukan oleh bendahara ataupun operator.

Pelaksanaan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual ini, Pemerintah Kabupaten Majene dalam berbagai kesempatan senantiasa melakukan pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pengelola keuangan daerah. Setiap tahun anggaran, pemerintah melalui OPD yang mempunyai fungsi pembinaan pengelolaan keuangan daerah melaksanakan program bimbingan teknis dan pelatihan secara periodik. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar memperkuat sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah utamanya yang terkait dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat OPD sebagai entitas akuntansi maupun di OPD selaku penyusun laporan keuangan pemerintah daerah (BPK RI, 2021)

Pada akhirnya pemerintah daerah telah melakukan segala upaya maksimal dalam menjalankan sistem akuntansi pemerintah daerah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun Pemerintah Kabupaten Majene telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Barat sebanyak tujuh kali berturut-turut, namun hal tersebut bukan menjadi jaminan bahwa praktik pengelolaan keuangan utamanya pada ranah pelaporan tidak meninggalkan permasalahan. Masih cukup banyak pekerjaan rumah yang tersisa bagi pemerintah daerah dalam dunia pengelolaan keuangan daerah. Namun, dengan strategi yang tepat, pemerintah berharap dapat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual dengan baik dan efektif agar mewujudkan aspek akuntabilitas

dan transparansi yang baik demi terciptanya lingkungan *Good Governance* di Kabupaten Majene.

Peneliti lain telah membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi merupakan pengaruh penting bagi peningkatan kinerja organisasi dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual untuk organisasi sektor publik (Anto *et al.*, 2022; Awaluddin *et al.*, 2020; Nasution & Supriana, 2019; Firmansyah *et al.*, 2020; Muda & Afrina, 2019; Primasari *et al.*, 2018). Namun, belum ada penelitian mengenai kapasitas organisasi dalam penerapan SAP berbasis akrual.

Kapasitas organisasi dapat dilihat sebagai kapasitas kolektif suatu organisasi, dengan penekanan kuat pada tujuan peningkatan kapasitas tersebut (Farazmand, 2004). Christensen & Gazley, (2008) mengartikan sifat multifaset dari kapasitas internal organisasi sektor publik tergantung pada kompetensi organisasi dalam mencapai serangkaian tujuan organisasi. Kemampuan untuk menetapkan serangkaian tujuan organisasi yang jelas dan untuk secara kolektif mengimplementasikan tujuan tersebut mengharuskan organisasi untuk mengadopsi mekanisme untuk mendapatkan dan mengevaluasi umpan balik. Hal ini dapat dimengerti, karena salah satu perhatian utama organisasi publik adalah bagaimana meminimalkan biaya dan pada saat yang bersamaan dapat mencapai kinerja organisasi (Christensen & Gazley 2008; Jung *et al.*, 2014).

Kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi (Dalimunthe & Muda, 2017; Muda & Afrina, 2019). Pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Peningkatan

kapasitas organisasi dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, motivasi dan berbagai program sumber daya manusia sebagai pilar utama yang mendukung dan menggerakkan organisasi dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Farazmand (2004) menyatakan bahwa para ahli berpendapat bahwa agar organisasi sektor publik mencapai tingkat pelayanan yang memuaskan, mereka harus mengembangkan strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan organisasi di masa depan. Mereka harus mampu membangun kapasitas organisasi yang memadai. Sementara kapasitas organisasi sering dianggap sebagai masukan untuk mencapai tujuan organisasi dan memenuhi tingkat kinerja tertentu, memiliki aturan dan prosedur yang diperlukan untuk manajemen kontrak juga penting karena ini mencerminkan kemampuan organisasi untuk mengumpulkan data dan mengembangkan ukuran yang akan memungkinkannya untuk melacak kinerja pengaturan di masa depan (Jung *et al.*, 2014).

Selain Kapasitas organisasi, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat digunakan sebagai alat lainnya dalam implementasi SAP berbasis akrual sebagaimana penelitian Muda & Landau (2019) yang menyatakan bahwa sistem informasi yang telah banyak digunakan oleh instansi pemerintah adalah Sistem Informasi Berbasis Komputer. Namun, untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas dengan teknologi informasi, dibutuhkan campur tangan manusia untuk mengendalikan sistem tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan orang-orang yang ahli di bidang sistem informasi yang memahami dan dapat mengoperasikan suatu sistem dengan baik sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah. informasi akuntansi yang baik adalah informasi

yang menunjukkan keadaan aktual yang ditafsirkan dalam bentuk laporan keuangan dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku.

Penelitian tentang pemanfaatan teknologi informasi juga sudah ada beberapa yang dilakukan dan terbukti efektif. Seperti dalam penelitian Anto *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual. Selain itu, Salah satu hambatan keberhasilan implementasi sistem adalah faktor perilaku individu yang merasa cemas atau khawatir terhadap implementasi teknologi informasi (Primasari *et al.*, 2017).

Secara empiris, penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi, implementasi SAP dan komitmen organisasi pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan penelitian terdahulu ini penulis jadikan acuan dalam penyusunan tesis ini, namun belum ada penelitian mengenai kapasitas organisasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas, (2018) bahwa pendekatan dalam menerapkan SAP pendekatan berbasis akrual telah diterapkan di Pemerintah Daerah Indonesia, dengan pencapaian implementasi, dan memiliki waktu yang efisien jika dibandingkan dengan SAP berbasis kas pada negara lain. SAP berbasis akrual ini dapat meningkatkan fungsi dan kegunaan akuntansi berbasis akrual demi pelaporan keuangan yang akuntabel. Namun demikian, ketatnya regulasi keuangan dan birokrasi pemerintah membatasi Pemerintah Daerah Indonesia dalam inovasi dan proses pengambilan keputusan, karena mereka membutuhkan persetujuan Pemerintah Pusat untuk mengambil beberapa keputusan strategis seperti dalam rekrutmen pegawai.

Penelitian yang dilakukan oleh Awaluddin *et al.* (2020) menunjukkan dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, dengan menyiapkan sistem informasi yang mudah dipelajari dan dioperasikan, kinerja organisasi akan lebih baik dan meningkat dalam pelaporan keuangannya, seperti penyelesaian pelaporan keuangan dengan tepat waktu, dan informasi yang dihasilkan lebih akurat. komitmen organisasi yang tinggi yang ditunjukkan dengan keterlibatan, tanggung jawab dan loyalitas dalam mencapai tujuan organisasi dalam penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Afrarudin & Kurniati (2016) & Firmansyah *et al.* (2020), berpendapat bahwa kendala yang mungkin dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait dengan penerapan akuntansi berbasis akrual adalah kemampuan sumber daya manusia yang belum memahami Prinsip Standar Akuntansi berbasis akrual, jumlah tenaga akuntansi masih sedikit, sistem akuntansi dan implementasinya masih sulit untuk dipahami, kurangnya sosialisasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Sementara itu, Afiqoh, (2019) menyatakan bahwa hal penting yang diperlukan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual adalah adanya komitmen terkait penerapan SAP berbasis akrual. Selanjutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Sudaryati & Permana, (2020) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan SAP berbasis akrual sejak tahun 2015. Namun adanya kendala yang dihadapi adalah kurangnya persiapan waktu, kesalahan aplikasi yang sering terjadi hingga staf yang melakukan pengolahan data tidak memiliki kompetensi. Dengan adanya permasalahan ini, maka dilakukan pelatihan dan pengembangan terkait sumber daya dilakukan secara intens.

Penelitian ini akan menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Komitmen organisasi merupakan kemampuan dan keinginan seseorang untuk menyeimbangkan perilaku pribadi dan kebutuhan, prioritas dan

sasaran organisasi (Sutisman *et al.*, 2021). Komitmen organisasi akan menunjukkan keyakinan, dukungan dan loyalitas terhadap nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi (Mowday & Steers, 1979). Komitmen organisasi yang kuat akan menyebabkan individu berusaha mencapai tujuan organisasi, berpikir positif dan berusaha melakukan yang terbaik untuk organisasi.

Komitmen organisasi merupakan bentuk loyalitas yang lebih konkrit yang dapat dilihat dari sejauh mana karyawan mencurahkan perhatian, gagasan, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi adalah sejauh mana karyawan percaya dan bersedia menerima tujuan organisasi dan akan tetap dan tidak akan meninggalkan organisasi. Komitmen organisasi merupakan dorongan dari dalam diri individu/kelompok untuk melakukan sesuatu guna mendukung keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan individu atau kelompok. Di pemerintah daerah, Pejabat yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi dari pemerintah daerah akan berdampak pada komitmen tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan (Anto *et al.*, 2022).

Komitmen organisasi mencerminkan tingkat dimana seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi sehingga menciptakan suatu kondisi keterikatan dan tanggung jawab terhadap organisasi (Pradipa & Munidewi, 2018). Menurut Robbins, (2008); Fauzi & Supria (2019) mendefinisikan keterlibatan kerja yang

tinggi dalam mendukung pekerjaan individu individu, sedangkan komitmen organisasi yang tinggi berarti mendukung organisasi yang merekrut individu.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris sejauh mana pengaruh kapasitas organisasi, pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual, serta menguji sejauh mana komitmen organisasi dapat memoderasi kedua variabel tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Kapasitas organisasi, Pemanfaatan teknologi informasi Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Yang Dimoderasi Oleh Komitmen Organisasi Di Pemerintah Kabupaten Majene** dengan keterbaruan penelitian adanya komitmen organisasi yang dijadikan variabel moderasi antara variabel kapasitas organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kapasitas organisasi berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemkab Majene?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemkab Majene?
3. Apakah kapasitas organisasi yang dimoderasi oleh komitmen organisasi berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemkab Majene?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi oleh komitmen organisasi berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemkab Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan membahas adanya pengaruh antara kapasitas organisasi (X_1) terhadap implementasi SAP berbasis akrual (Y) di Pemkab Majene.
2. Untuk menganalisis dan membahas adanya pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi (X_2) terhadap implementasi SAP berbasis akrual (Y) di Pemkab Majene.
3. Untuk menganalisis dan membahas adanya pengaruh antara kapasitas organisasi (X_1) yang dimoderasi oleh komitmen organisasi (Z) berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual (Y) di Pemkab Majene?
4. Untuk menganalisis dan membahas adanya pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi (X_2) yang dimoderasi oleh komitmen organisasi (Z) terhadap implementasi SAP berbasis akrual (Y) di Pemkab Majene.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam usulan penelitian tesis ini, sistematika penulisan terdiri atas tujuh bab, masing- masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian besar menyempurnakan usulan penelitian yang berisikan tentang latar belakang masalah , perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara terperinci

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini digambarkan kerangka berpikir serta konsep penelitian yang menyatakan hubungan antara variabel penelitian dan dilengkapi dengan perumusan hipotesis.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metodologi yang terdiri dari tempat dan jadwal penelitian, pengumpulan data, sumber data dan jenis data serta metode analisis data.

BAB V HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari data dan deskripsi hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Pada awalnya, *Theory of Planned Behavior* (TPB) diterapkan dalam berbagai penelitian untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap beragam perilaku di bidang psikologi sosial. *Theory of Planned Behavior* (TPB) telah teruji sebagai salah satu teori yang mampu memprediksi perilaku manusia dengan akurat. Teori ini dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) atau Teori Tindakan Beralasan yang digagas oleh Ajzein & Fishbein (1970). Teori tindakan beralasan Ajzein & Fishbein (1970), mengasumsikan perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu atau sebaliknya. Keinginan ditentukan oleh dua variabel independen termasuk sikap dan norma subyektif.

Berdasarkan teori ini, sikap individu terhadap suatu perilaku diperoleh dari keyakinan terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, yang diistilahkan dengan *behavioral beliefs* (keyakinan terhadap perilaku). Keyakinan terhadap perilaku menghubungkan perilaku dengan hasil tertentu, atau beberapa atribut lainnya seperti biaya atau kerugian yang terjadi saat melakukan suatu perilaku. Dengan kata lain, seseorang yang yakin bahwa sebuah tingkah laku dapat menghasilkan *outcome* yang positif, maka individu tersebut akan memiliki sikap yang positif, begitu juga sebaliknya. TPB menyebutkan bahwa perilaku (*behavior*) seseorang dapat diprediksi oleh minat perilaku (*behavior intention*) dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*). Minat perilaku

memiliki tiga *antecedent* yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*).

Norma subjektif (*subjective norm*). Norma-norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Norma subjektif menggambarkan sejauh mana seseorang memiliki motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukannya (*normative belief*) jika individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan apa yang akan dia lakukan bukan ditentukan oleh orang lain di sekitarnya, maka dia akan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya. Ajzein & Fishbein (1970) menggunakan istilah *motivation to comply* untuk menggambarkan fenomena ini, yaitu apakah individu mematuhi pandangan orang lain yang berpengaruh dalam hidupnya atau tidak.

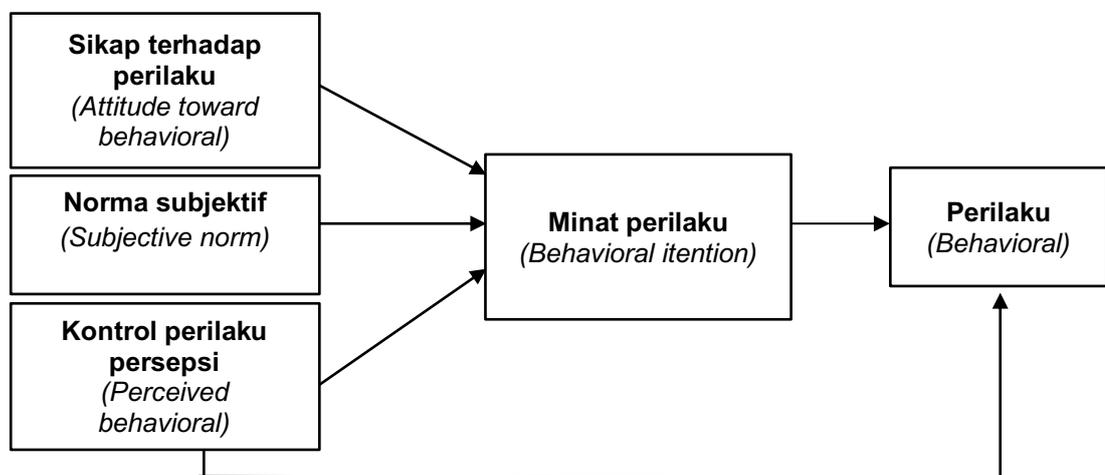
Keyakinan normatif berkenaan dengan harapan-harapan yang berasal dari *referent* atau orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (*significant others*) seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja, atau lainnya, tergantung pada perilaku yang terlibat (Ajzein & Fishbein, 1970). Norma subjektif didefinisikan sebagai adanya persepsi individu terhadap tekanan sosial yang ada untuk menunjukkan atau tidak suatu perilaku. Individu memiliki keyakinan bahwa individu atau kelompok tertentu akan menerima atau tidak menerima tindakan yang dilakukannya. Apabila individu meyakini apa yang menjadi norma kelompok, maka individu akan mematuhi dan membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompoknya.

Kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*). Schifter & Ajzen (1985) menambahkan sebuah konstruk yang sebelumnya tidak ada di dalam *TRA*. Konstruk ini ditambahkan ke *TPB* untuk mengontrol perilaku yang dibatasi

oleh keterbatasan-keterbatasan kurangnya sumber daya untuk melakukan perilaku. Konstruk yang ditambahkan tersebut adalah konstruk perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Kontrol perilaku persepsian didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku (Ajzen, 1991).

Banyak faktor yang dapat mengganggu hubungan antara niat dan perilaku. Keberhasilan kinerja dan perilaku tergantung dari kemampuan seseorang untuk mengontrol faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku, walaupun kontrol kemauan (*volitional control*) adalah salah satu yang paling mempengaruhi perilaku dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain, keterbatasan-keterbatasan personal dan hambatan-hambatan eksternal dapat juga mengganggu kinerja dari perilaku (Ajzen, 1991).

Ajzen (1991) menjelaskan bahwa *perceived behavioral control* memegang peran penting dalam TPB. *Perceived behavioral control* didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku (Jogiyanto, 2007). *Perceived behavioral control* dihubungkan ke persepsi manusia mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku yang diinginkan. Model dari TPB dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 Diagram Konsep Teori TPB

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa TPB dapat mempunyai dua fitur yaitu teori ini mengasumsikan bahwa *perceived behavioral control* mempunyai implikasi terhadap niat dan kemungkinan hubungan langsung antara *perceived behavioral control* dan perilaku. TPB secara eksplisit mengenal kemungkinan bahwa banyak perilaku tidak semuanya di bawah kontrol penuh sehingga konsep *perceived behavioral control* ditambahkan untuk menangani perilaku-perilaku semacam ini (Jogiyanto, 2007).

Implikasi *theory of planned behavior* dalam penelitian ini memberi bukti empiris bahwa *theory of planned behavior* dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku menggunakan kapasitas dan komitmen organisasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual untuk pengambilan keputusan. TPB menyebutkan bahwa perilaku (*behavior*) seseorang dapat diprediksi oleh minat perilaku (*behavior intention*) dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*). Minat perilaku memiliki tiga *antecedent* yaitu sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*). Indikator variabel *theory of planned behavior* yang telah diadaptasikan tersebut berhasil memberikan bukti empiris bahwa kepercayaan terhadap Implementasi SAP akuntansi basis akrual, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku persepsian, minat mampu memprediksi perilaku menggunakan akuntansi basis akrual.

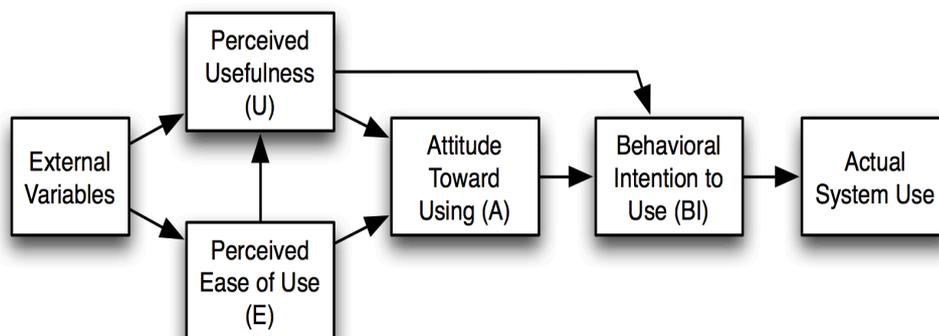
2.1.2 Technology Acceptance Model

Technology Acceptance Model (TAM) atau Model penerimaan teknologi adalah salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Davis tahun 1989. Model Penerimaan Teknologi (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) adalah model yang

berhasil dan sangat dapat diterima untuk memprediksi penerimaan terhadap suatu teknologi yang baru diterapkan.

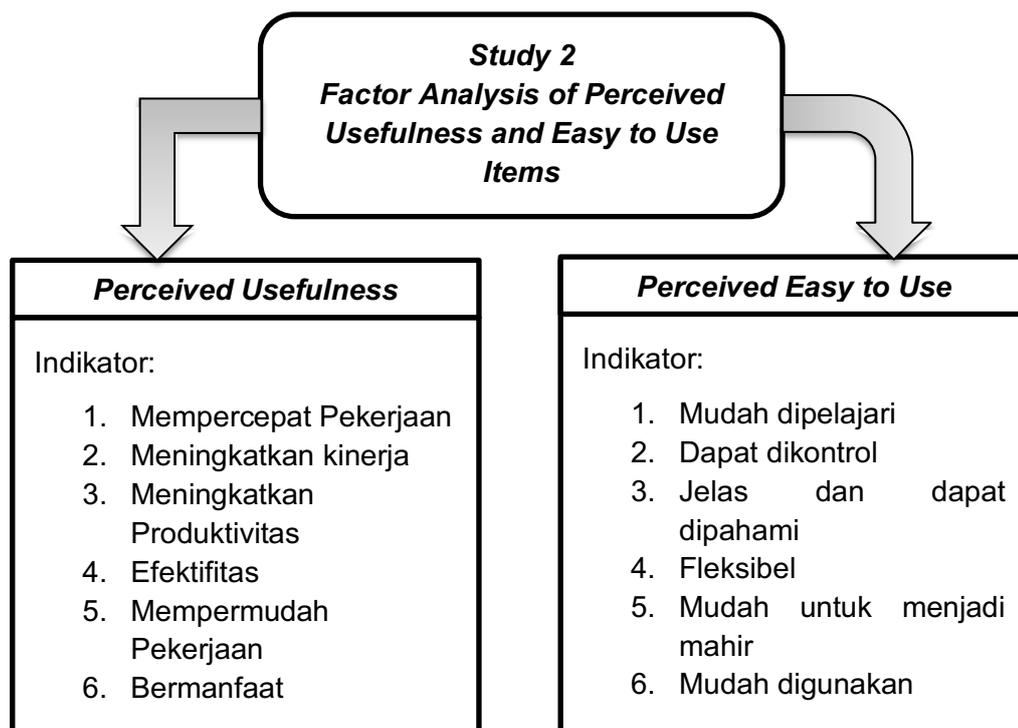
Menurut Davis (1989) *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah sebuah teori sistem informasi yang didesain guna menerangkan bagaimana pengguna mengerti dan mengaplikasikan sebuah teknologi informasi. TAM mengadopsi *Theory of Reasoned Action (TRA)* dari Fishbein (1967) yang digunakan untuk melihat tingkat penggunaan responden dalam menerima teknologi informasi, dan diyakini mampu meramalkan penerimaan pemakai terhadap teknologi berdasarkan dampak dari dua faktor, yaitu perspektif kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan perspektif kemudahan pemakaian *perceived ease of use* (Davis, 1989a). Konstruksi asli TAM sendiri yang dirumuskan oleh Davis (1989) adalah persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), persepsi kemudahan pemakaian (*perceived ease of use*), sikap (*attitude*), niat perilaku (*behavioral intention*), penggunaan sebenarnya (*actual use*) dan ditambahkan beberapa perspektif eksternal yaitu, pengalaman (*experience*) serta kerumitan (*complexity*). Berikut merupakan model TAM yang diperkenalkan oleh Davis (1989):

Gambar 2.1 Diagram Konsep Teori TAM



TAM seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1, merupakan adaptasi dari TRA dan secara eksplisit disesuaikan untuk memodelkan penerimaan pengguna terhadap Sistem Informasi (SI) dengan memberikan klarifikasi tentang pembuatan penerimaan komputer yang biasanya juga dilengkapi untuk mengklarifikasi perilaku pengguna pada berbagai tujuan akhir. TAM telah terbukti menjadi model yang berguna dalam membantu memahami bahwa pengguna akan menerima teknologi yang berguna bagi mereka dengan memberikan manfaat khusus untuk meningkatkan kinerja mereka, (Amadu *et al.*, 2018; Dumpit & Fernandez, 2017).

Berdasarkan keenam konstruk tersebut terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi sistem teknologi ataupun sistem informasi. Faktor pertama adalah persepsi kebermanfaatan atau kemudahan, sedangkan faktor kedua adalah persepsi kegunaan dalam penggunaan teknologi. Indikator TAM menurut Davis (1989) seperti pada Gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2 Factor Analysis of TAM Items (Davis, 1989).

Dalam memprediksi niat perilaku untuk mengadopsi teknologi, TAM telah banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti psikologi, sosiologi dan manajemen karena fleksibilitas, ketahanan, dan kekuatan penjelas (Agrebi & Jallais, 2015; Gangwar *et al.*, 2015; Shiau & Chau, 2016). TAM telah diperkenalkan oleh Davis (1989) pada tesis doktornya yang didasarkan pada konsep dari TRA Lai (2017). TAM telah menjadi sangat populer dan telah dikutip di sebagian besar penelitian yang berhubungan dengan penerimaan pengguna terhadap teknologi (Agrebi & Jallais, 2015; Gangwar *et al.*, 2015; Shiau & Chau, 2016). Dengan menggunakan TAM membantu peneliti dan praktisi untuk menentukan mengapa teknologi atau sistem tertentu dapat diterima atau ditolak dan dapat mengambil langkah-langkah penjelasan yang sesuai selain memberikan prediksi terutama untuk implementasi sistem baru (Lai, 2017). Dalam model TAM, niat pengguna untuk menggunakan aplikasi akan dijelaskan dan diprediksi oleh persepsinya tentang kegunaan teknologi dan kesederhanaannya Awa *et al.* (2015).

Implikasi teori *Technology Acceptance Model (TAM)* dalam penelitian ini antara lain: pertama, TAM merupakan model perilaku yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi informasi tidak bisa diterapkan, karena pemakainya tidak mempunyai keinginan untuk menggunakannya. Terdapat faktor psikologi atau perilaku di dalam model TAM yang tidak ada pada model penerapan sistem teknologi informasi lainnya. Kedua, model TAM dibangun atas dasar teori yang kuat. Ketiga, TAM juga telah diuji pada banyak penelitian dimana hasilnya sebagian besar mendukung dan menyimpulkan bahwa TAM adalah model yang baik. Keempat, TAM merupakan model yang parsimoni, yaitu model sederhana tetapi valid.

2.1.3 Kapasitas Organisasi

Menurut Rowe *et al.* (1999) dan Jung *et al.* (2014) Kapasitas Organisasi adalah kemampuan suatu lembaga untuk menyusun sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi. Pada umumnya kapasitas organisasi dapat mencakup berbagai sumber daya vital untuk mencapai serangkaian tujuan organisasi, bersama dengan kemampuan untuk secara kolektif, memobilisasi sumber daya internal dan eksternal. Sedangkan Menurut (Eisinger, 2002; Sun & Asencio 2019) Kapasitas organisasi adalah tentang kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut Brown *et al.* (2001) dan Odelia *et al.* (2018) terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan *capacity building* dalam lingkup organisasi yang meliputi struktur, proses-proses dan sistem manajerial yang dapat membuat organisasi berjalan optimal dalam menghadapi dinamika perubahan. pengembangan kapasitas dalam lingkup organisasi memiliki 5 elemen diantaranya *mission, vision and strategy, structure, management systems, partnership, external relation and networking* dan *leadership governance*. Sedangkan menurut Leavitt (1989) dalam tingkatan pengembangan kapasitas kelembagaan meliputi sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan. Kemudian menurut Soeprapto, (2006) dan Odelia *et al.* (2018) aspek pengembangan kapasitas organisasi yang sesuai dengan penelitian kali ini yaitu aspek proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme kerja, pengaturan sarana dan prasarana, hubungan atau jaringan.

Selanjutnya, Keban, (1999) menjelaskan dasar pemikiran program pengembangan kemampuan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia selama ini

dapat diidentifikasi melalui dimensi-dimensi utama pengembangan organisasi, yakni:

- a) Pertama, dimensi kebijakan, meliputi perencanaan strategik dan analisis kebijakan publik. Batasan pengembangan dimensi kebijakan meliputi dua aspek yaitu bagaimana menentukan rencana strategis yang berfungsi memberi arah bagi pembangunan dan pelayanan publik pada tingkat lokal, dan bagaimana merumuskan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik yang mengacu pada arah tersebut.
- b) Kedua, dimensi desain organisasi, yaitu suatu upaya penyusunan struktur dan proses kelembagaan yang didasarkan pada rencana strategis dan kebijakan pembangunan serta kebutuhan pelayanan publik dengan mengutamakan prinsip-prinsip diferensiasi, formalisasi, dan dispersi otoritas yang tepat.
- c) Ketiga, dimensi manajemen, yaitu suatu upaya pencapaian tujuan kebijakan pembangunan dan pelayanan publik dengan mengimplementasikan keterampilan manajerial dan penerapan pola kepemimpinan yang efektif.
- d) Keempat, dimensi akuntabilitas, yaitu suatu upaya memprioritaskan tanggung jawab terhadap masyarakat lokal atau customer di dalam proses penentuan rencana strategis, perumusan kebijakan, desain organisasi, dan manajemen berdasarkan legal dan political accountability. Kelima, dimensi moral dan etos kerja, yaitu suatu upaya menggunakan nilai-nilai dasar kemanusiaan seperti: keadilan, kesamaan dan kebebasan dalam penentuan rencana strategis, pemilihan alternatif kebijakan, desain organisasi dan manajemen, dan menginstitutionalisasi etos kerja.

Kapasitas sumber daya manusia aparatur sangat menentukan kapasitas birokrasi pemerintah Kabupaten dan Kota. Grindle (1997) menjelaskan bahwa dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia akan membuat tujuan sebuah organisasi akan tercapai. Hal ini, dapat diukur dari kapasitas pengetahuan, kapasitas keterampilan, serta perilaku dan etika kerja pegawai. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap stakeholders. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pegawai, baik melalui pendidikan formal, maupun dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai.

Tujuan utama pengembangan kapasitas organisasi melalui penyelenggaraan pelayanan publik pada prinsipnya adalah mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai harapan publik. Kesesuaian yang dimaksud adalah melalui pencapaian tujuan pelayanan publik itu sendiri dan menggunakan cara yang sesuai terhadap kebutuhan penyandang kebutuhan khusus, dalam hal ini adalah anak autis, dan diharapkan dapat menemukan model pelayanan yang tepat bagi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran pelayanan tersebut (Irawan, 2016:38).

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas organisasi adalah suatu proses meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dikaitkan dengan organisasi pemerintah daerah yang berada di bawah pemerintah pusat, kapasitasnya merujuk pada kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh instansi pemerintah daerah dengan tingkat efisiensi yang dapat dicapai dalam menyusun perencanaan,

mengimplementasikan, mengelola dan mengevaluasi kebijakan, strategi atau program yang dirancang untuk memberi dampak terhadap keadaan masyarakat di sekitar daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

2.1.4 Pemanfaatan teknologi informasi

Menurut Badan Pemerintahan Nasional dan Badan Pemeriksa Keuangan (2000), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau jawaban dan penjelasan atas kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang berhak. atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, keandalan, dan prediktabilitas. Pertanggungjawaban bukanlah suatu konsep yang abstrak melainkan suatu konsep yang konkrit dan harus ditentukan oleh undang-undang melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah yang harus dipertanggung jawabkan. Fikri *et al.* (2018) menunjukkan strategi untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi merupakan sinergi dari aplikasi penganggaran desa elektronik dan sistem pemantauan elektronik. Harrison (2008) menunjukkan Transparansi adalah praktik yang menjadi kriteria keuangan, terutama yang berkaitan dengan audit dan pengendalian perluasan sub-pusat.

Teknologi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik yang kompleks. Pemanfaatan teknologi dan informasi yang berkualitas dalam hal ini aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu pejabat pengelola keuangan OPD maupun PPKD dalam menyusun laporan keuangan yang berbasis akrual dengan efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (Nadir & Hasyim, 2017).

Menurut Muda & Afrina (2019) Kepuasan pengguna sistem informasi dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu sistem informasi. Kepuasan pengguna kemudian menjadi bagian dalam model pengembangan keberhasilan sistem informasi. Sistem informasi terhadap pemenuhan kebutuhan dan harapan pengguna adalah sistem informasi yang berkualitas tinggi, yang cepat dalam menampilkan informasi, aktual, dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kunci keberhasilan dalam memuaskan pengguna sistem informasi adalah pada kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia sistem informasi. Manfaat teknologi informasi dalam membangun individu, perusahaan, bahkan suatu negara sangat berdampak besar. Terbukti bahwa teknologi informasi dapat mengubah Individu, perusahaan, bahkan organisasi dan negara (Winter *et al.*, 2009; Muda & Afrina, 2019).

Penerapan sistem komputerisasi akuntansi pada pemerintah daerah akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi (Pattiasina & Noch, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya akan dapat meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan daerah diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan peraturan pengganti dari PP No.11 tahun 2001 tentang sistem informasi keuangan daerah (Eka Kurniawati, 2019).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan penerapan sistem komputerisasi akuntansi untuk mempercepat pencatatan, penyajian, Analisa dan laporan keuangan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan keuangan dan analisa laporan keuangan guna mendukung pengambilan keputusan mengenai keuangan dalam satu periode akuntansi.

2.1.5 Komitmen Organisasi

Menurut Mowday & Steers (1979) dan Mudrikah & Ali (2018) komitmen organisasi adalah dimensi perilaku yang sangat penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasi merupakan keinginan anggota organisasi untuk tetap mempertahankan anggotanya dalam organisasi dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi (Septyaningtyas & Taufik, 2022).

Menurut Robinson (1998) Komitmen organisasi adalah suatu kondisi di mana seorang individu memihak organisasi dan tujuan serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Komitmen organisasi merupakan bentuk loyalitas yang lebih konkrit yang dapat dilihat dari sejauh mana karyawan mencurahkan perhatian, gagasan, dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi adalah sejauh mana karyawan percaya dan bersedia menerima tujuan organisasi dan akan tetap dan tidak akan meninggalkan organisasi.

Komitmen organisasi merupakan kemampuan dan keinginan seseorang untuk menyeimbangkan perilaku pribadi dan kebutuhan, prioritas dan sasaran organisasi (Sutisman *et al.*, 2021). Komitmen organisasi mencerminkan tingkat dimana seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya. Oleh karena itu, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut

memiliki (sense of belonging) bagi pekerja terhadap organisasi sehingga menciptakan suatu kondisi keterikatan dan tanggung jawab terhadap organisasi (Pradipa & Munidewi, 2018).

Allen & Meyer (1993) mengemukakan tiga komponen tentang komitmen organisasi:

- a) *Affective Commitment*, terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional (*emotional attachment*) atau merasa mempunyai nilai sama dengan organisasi.
- b) *Continuance Commitment*, yaitu kemauan individu untuk tetap bertahan dalam organisasi karena tidak menemukan pekerjaan lain atau karena rewards ekonomi tertentu.
- c) *Normative Commitment*, timbul dari nilai-nilai karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena ada kesadaran bahwa berkomitmen terhadap organisasi merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan.

Dalam penelitiannya Arifuddin *et al.* (2014) terdapat 3 hal penting dalam menjalankan komitmen organisasi, yaitu: penerimaan nilai-nilai serta tujuan organisasi, kesiapan serta keinginan untuk berjuang dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi, dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi (menjadi bagian dalam organisasi).

Dengan adanya komitmen pegawai pada organisasi, maka penerapan SAP berbasis akrual dapat terlaksana dengan baik, dengan begitu kualitas laporan keuangan akan meningkat. Hal ini menunjukkan semakin baik komitmen organisasi dalam penerapan standar akuntansi pemerintah maka akan menghasilkan laporan keuangan yang semakin berkualitas (Aulia *et al.*, 2019).

Menurut Mudrikah & Ali (2018) komitmen yang tinggi menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingan pribadi dan berusaha menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, komitmen penting bagi setiap pejabat pengelola keuangan untuk penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan guna menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Kemudian ada pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi faktor pendukung untuk terciptanya kinerja yang baik diperlukan juga komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan kemampuan dan keinginan seseorang untuk merasa memiliki terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas sehingga menciptakan suatu kondisi keterikatan dan tanggung jawab demi tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi tersebut.

2.1.6 Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Standar akuntansi sangat penting sebagai pedoman untuk pembuat laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas informasi keuangan serta menyulitkan dalam pengendalian (Mahardini & Miranti, 2018).

Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan

menyajikan laporan keuangan pemerintah (Talitha, 2021). Dalam Ketentuan Penutup Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penerapan SAP Berbasis Akruwal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal menjadi penerapan SAP Berbasis Akruwal. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akruwal dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan

pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun yaitu pada Tahun 2015. SAP Basis kas adalah SAP yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas (Mahardini & Miranti, 2018). Basis akrual berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

2.2 Tinjauan Empiris

Banyak penelitian-penelitian sebelumnya mengenai implementasi SAP berbasis akrual dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menggunakan variabel kapasitas organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Odelia *et al.*, (2018) mendeskripsikan peningkatan kapasitas organisasi melalui sistem informasi manajemen rumah sakit untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD dr. Mohammad Soewandhie Surabaya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menggambarkan bahwa peningkatan kapasitas organisasi melalui sistem informasi manajemen rumah sakit masih memiliki permasalahan yaitu pada aspek sarana dan prasarana. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu adanya peningkatan kapasitas organisasi dalam mengupayakan penerapan sistem informasi manajemen rumah sakit dapat berjalan secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Muda & Afrina (2019) yang menguji pengaruh sumber daya manusia terhadap pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna sistem akuntansi berbasis akrual memberikan hasil bahwa kualitas sistem, informasi, dan sumber daya manusia berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan Pengguna terhadap aplikasi Sistem Akuntansi Lembaga Berbasis Akrual. Kualitas Sumber Daya Manusia sebagai variabel moderating mampu memoderasi hubungan antara kualitas sistem dan kualitas informasi dalam kepuasan Pengguna aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual.

Penelitian yang dilakukan oleh Anto *et al.*, (2022) yang menjelaskan beberapa pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi dan keberhasilan penerapan akuntansi berbasis

akrual. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah. hal ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, dan semakin baik pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan serta semakin tinggi komitmen organisasi kepada pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi *et al.*, (2019) yang menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan aplikasi keuangan, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi sumber daya manusia, penerapan aplikasi keuangan, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan aplikasi keuangan, dan penerapan standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah *et al.*, (2020) yang menguji pengaruh kompetensi pegawai dan komitmen organisasional terhadap penerapan akuntansi akrual pada barang milik daerah di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada barang milik daerah di Indonesia. hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pegawai pengelola barang milik daerah penting dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia untuk mendukung

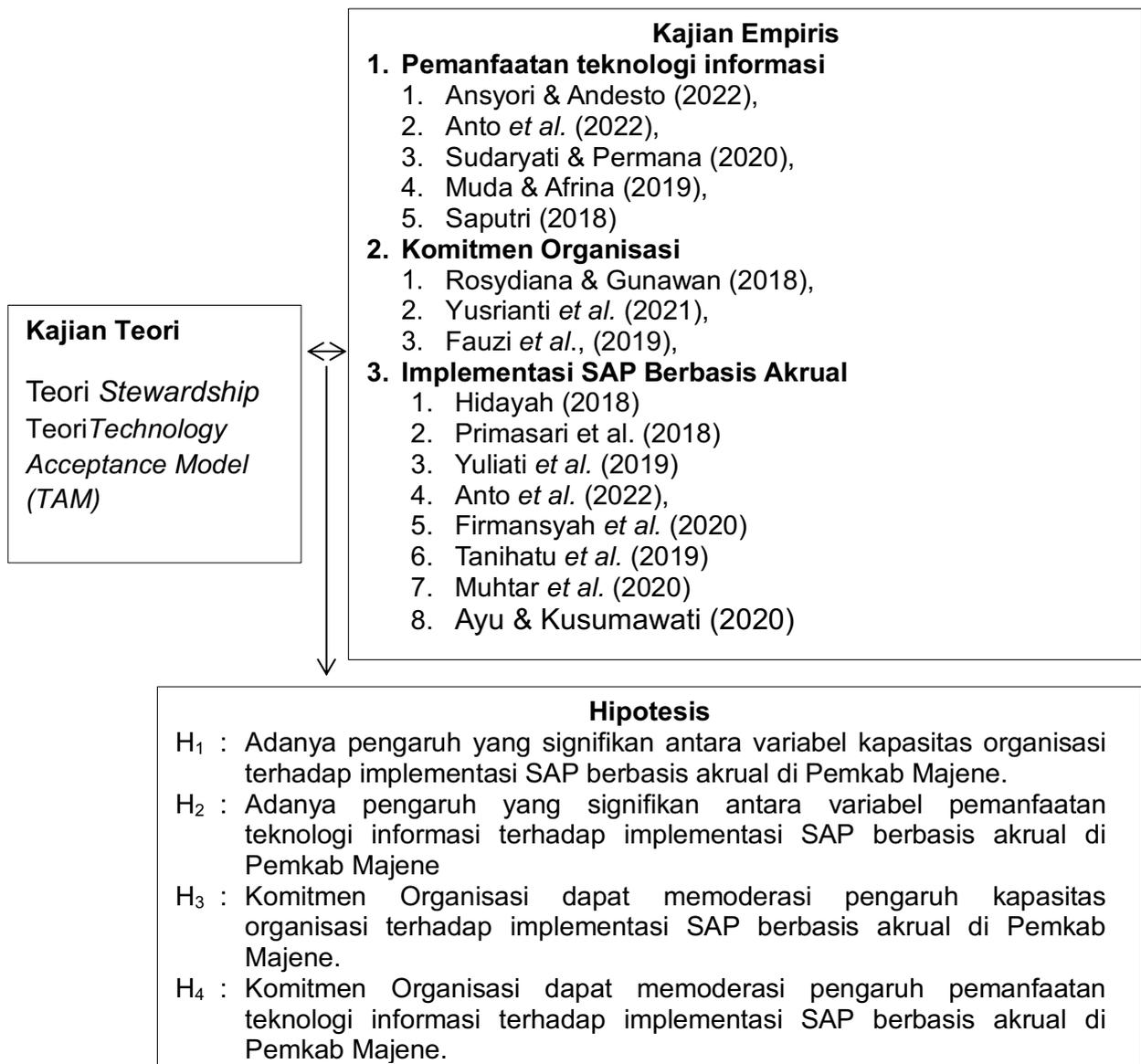
peningkatan kualitas laporan keuangan. Pegawai tidak memiliki pilihan ketika bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga pegawai merasa dalam hal apapun lembaga tempat mereka ditempatkan, mereka menganggap bahwa lembaga tersebut adalah Lembaga yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Namun, ini tidak mengakibatkan pegawai harus memenuhi kompetensinya ketika bekerja dan ditempatkan di instansi pengelola BMD. Pegawai menganggap bahwa bekerja di instansi manapun adalah instansi terbaik sehingga pegawai tidak memiliki nilai ketika ditempatkan di BMD instansi. Akibatnya, kondisi tersebut tidak mendukung peningkatan akuntansi berbasis akrual di BMD.

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

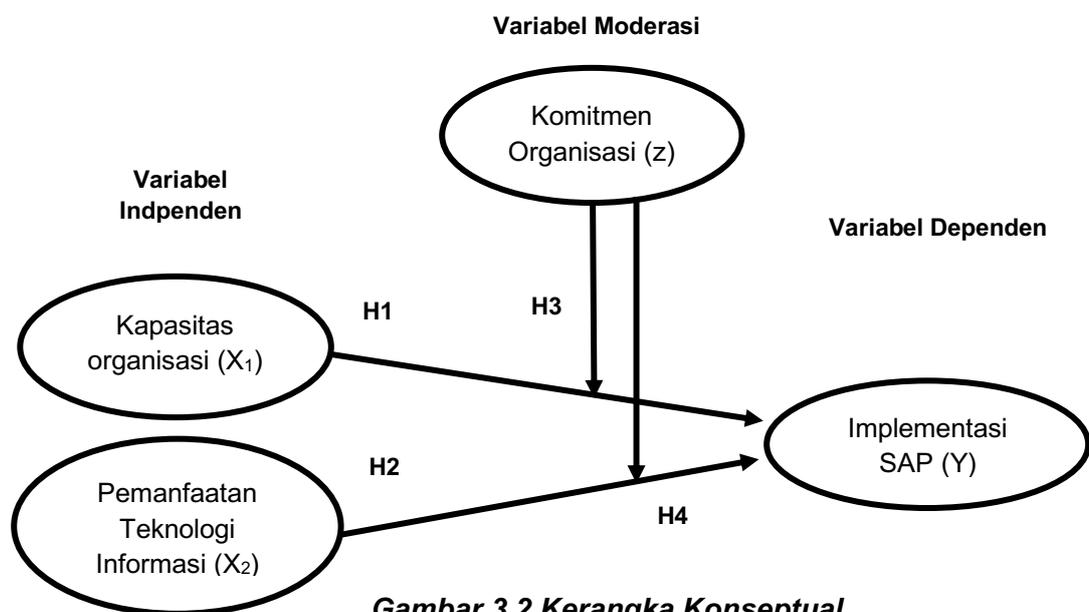
3.1 Kerangka Pemikiran

Berikut ini kerangka penelitian yang didasarkan pada kajian teoritis dan kajian empiris yang digambarkan pada bagan berikut ini :



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dijelaskan, maka penelitian ini menghasilkan sebuah kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan variabel dependen dengan independen serta pengaruh variabel moderasi. Variabel dependen yang digunakan adalah implementasi SAP berbasis akrual, sedangkan variabel independennya adalah kapasitas organisasi, pemanfaatan teknologi informasi. Variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komitmen organisasi. Keterkaitan variabel-variabel tersebut akan dinyatakan dalam kerangka konseptual yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

3.2.1 Pengaruh Kapasitas organisasi terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual.

Penelitian ini menggunakan *Theory of Perceived Behavior (TPB)* menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, kapasitas organisasi juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikannya yaitu kesanggupan para pegawai untuk melakukan tindakan

tersebut sesuai dengan skill yang dimiliki. Teori ini menyatakan bahwa keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan berpikir. Salah satu konsep kunci dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah adanya kemauan dari kapasitas organisasi yang menggerakkan atau mendorong terjadinya perilaku, dengan kata lain suatu perilaku atau tindakan baik positif maupun negatif akan dapat terwujud karena didahului oleh adanya kemauan untuk melakukannya. Penelitian ini menggunakan variabel kapasitas organisasi sebagai dorongan positif untuk mengimplementasikan SAP berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Majene.

Kapasitas Organisasi adalah kemampuan suatu lembaga untuk menyusun sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi (Rowe *et al.*, 1999; Jung *et al.*, 2014). Dalam sektor publik, kapasitas organisasi telah luas didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menyusun, mengembangkan, memimpin dan mengendalikan, manusia, sumber daya keuangan, fisik dan informasi (Ingraham *et al.*, 2003). Pada umumnya kapasitas organisasi dapat mencakup berbagai sumber daya vital untuk mencapai serangkaian tujuan organisasi, bersama dengan kemampuan untuk secara kolektif, memobilisasi sumber daya internal dan eksternal.

Sintesis kapasitas organisasi adalah karakteristik seseorang dalam hal berpikir, bersikap, bertindak, menarik kesimpulan yang dilatarbelakangi oleh aspek pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang dilakukan dalam periode tertentu. Sintesis dari Implementasi SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan

dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa adanya kaitan yang erat antara kapasitas organisasi dengan implementasi SAP berbasis akrual, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa :

H1 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kapasitas organisasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual.

3.2.2 Pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual

Penelitian ini menggunakan teori TAM khususnya pada elemen *perceived ease of use* dan *perceived usefulness*. Dalam elemen tersebut dijelaskan bahwa penerapan suatu sistem atau teknologi harus bisa menghadirkan kemudahan dan kebermanfaatan dari berbagai sisi. Artinya, Pemanfaatan teknologi informasi harus bisa memberikan manfaat sebagaimana fungsi yang diharapkan dengan kehadirannya sebagai suatu teknologi informasi. Implementasi SAP berbasis akrual dapat dikatakan berhasil apabila teknologi informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pengguna teknologi informasi.

Sintesis pemanfaatan teknologi informasi adalah penerapan sistem komputerisasi akuntansi untuk mempercepat pencatatan, penyajian, Analisa dan laporan keuangan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan keuangan dan analisa laporan keuangan guna mendukung pengambilan keputusan mengenai keuangan dalam satu periode akuntansi. Sintesis Implementasi SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis

akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ansyori & Andesto, (2022) menghasilkan kesimpulan bahwa teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Anto *et al.* (2022) menyatakan bahwa semakin tinggi kualitas teknologi informasi yang ada atau yang digunakan oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Fitrizal (2017) yang menyatakan bahwa sistem informasi tidak berpengaruh terhadap sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa adanya kaitan yang erat antara pemanfaatan teknologi informasi dengan implementasi SAP berbasis akrual, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa :

H2 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual

3.2.3 Komitmen organisasi memoderasi pengaruh kapasitas organisasi terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual.

Kapasitas Organisasi merupakan kemampuan pemerintah untuk menyusun, mengembangkan, memimpin dan mengendalikan, manusia, sumber daya keuangan, fisik dan informasi (Ingraham *et al.*, 2003). Penelitian ini menggunakan *Theory of Perceived Behavior (TPB)* dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pegawai dapat dikatakan komitmen apabila ia secara sukarela mau mempercayai, menerima, mengikuti, dan menjalankan dengan baik semua aturan, ketentuan, dan kebijakan organisasi. Dikaitkan dengan pengertian *intention* dalam teori TPB, maka komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai

representasi kognitif dari kesiapan pegawai berupa integritas, kompetensi, loyalitas dan menjalankan kebijakan organisasi dengan sukarela.

Sintesis kapasitas organisasi adalah karakteristik seseorang dalam hal berpikir, bersikap, bertindak, menarik kesimpulan yang dilatarbelakangi oleh aspek pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang dilakukan dalam periode tertentu. Sintesis implementasi SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Sintesis komitmen organisasi adalah kemampuan dan keinginan seseorang untuk merasa memiliki terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas sehingga menciptakan suatu kondisi keterikatan dan tanggung jawab demi tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kapasitas organisasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa :

H3 : Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh kapasitas organisasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemkab Majene.

3.2.4 Komitmen organisasi memoderasi pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap Implementasi SAP Berbasis Akrual.

Penelitian ini menggunakan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan model perilaku yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sistem teknologi informasi tidak bisa diterapkan, karena pemakainya tidak mempunyai keinginan untuk menggunakannya. Terdapat faktor psikologi atau perilaku di dalam model TAM yang tidak ada pada model penerapan sistem teknologi informasi lainnya.

Sintesis pemanfaatan teknologi informasi adalah penerapan sistem komputerisasi akuntansi untuk mempercepat pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan keuangan dan analisa laporan keuangan guna mendukung pengambilan keputusan mengenai keuangan dalam satu periode akuntansi. Sintesis implementasi SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Sintesis komitmen organisasi adalah kemampuan dan keinginan seseorang untuk merasa memiliki terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas sehingga menciptakan suatu kondisi keterikatan dan tanggung jawab demi tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariani *et al.* (2019) bahwa sistem informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh komitmen organisasi. Hal itu juga sama dengan penelitian Rosydiana & Gunawan (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Supriana, (2019) Komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan penerapan aplikasi keuangan, dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Andrianto & Rahmawati (2017), Satriawan & Dewi (2020) yang menyatakan komitmen organisasi tidak memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa :

H4 : Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual di Pemkab Majene.